



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025



LEMBAGA ADITYA MELAYU
KOTA TANJUNGPINANG

PENYAMPAIAN

KATA PENGANTAR

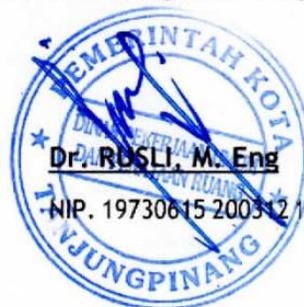
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2025 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang

Tanjungpinang, 2024

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	38
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V. PENUTUP	68
DAFTAR ISI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Tanjungpinang dibidang pembangunan dan penataan kota yang memasuki tahun ke dua pemerintahan baru.



Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Penyusunan rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang merupakan rencana jangka menengah (tiga tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana tiga tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis RPD dan Renstra OPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.



Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja OPD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
- b. Rumusan pprogram/kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
- c. Penyusunan Renja OPD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPD, Renstra OPD dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) , kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
 21. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 21).
 22. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 49).

Disamping Dasar Hukum yang menyertai penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang juga tetap berpijak pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, yang dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kota Tanjungpinang dan fokus pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya, yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun secara sistematis dalam rencana kerja SKPD tahun 2025.

Dengan Dasar Hukum ini, menjadi Dasar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah untuk menyajikan dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.
2. Program-program dapat terlaksana sesuai yang di harapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang meliputi : tahapan perumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dan tahap penyajian rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran sampai kepada dokumen Rencana Kerja.

Secara garis besar isi dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota



Tanjungpinang sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN;

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG TAHUN LALU;

Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang berisikan Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra , Analisis kinerja pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025

Bab V. PENUTUP.

Bab ini berisikan uraian penutup, menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2023 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 103.114.636.942,- anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung		
	a. Belanja Pegawai	Rp 9.129.597.284,-	Rp 8.858.473.875,-
2.	Belanja Langsung		
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 22.068.258.790,-	Rp 18.936.142.506,-
	b. Belanja Hibah	Rp 3.039.717.388,-	Rp 1.617.259.072,-
	c. Belanja Modal	Rp 68.877.063.480,-	Rp 56.423.944.201,-

Sedangkan untuk alokasi anggaran urusan wajib dan pilihan sebesar Rp. 103.114.636.942,- direncanakan untuk membiayai 11 program, 19 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan baik. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rencana kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.



- Sub Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Suangi (WS) dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dan Kontruksi Air Tanah dan Air Beku



3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM
 - Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
 - Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkantoran.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota



7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain fungsi bangunan Gedung.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
 - Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi, dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi



- Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan jasa Kontruksi

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang.

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.722.000.274,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 6.088.994.737,- Persentasi 90,58 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.926.276	118.710.013	96,57	100,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.001.180	123.895.424	93,15	100,00	
2	Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas	31.980.000	31.256.000	97,74	100,00	



	Perangkat Daerah	Beserta Atribut Kelengkapannya					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	72.655.000	90,82	100,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	29.266.000	28.950.419	98,92	100,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	804.206.300	641.855.500	79,81	100,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.097.950	36.694.380	98,91	100,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.795.800	177.758.150	86,80	100,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.392.840	117.864.074	69,99	100,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	-	-	-	-	
		Penyelenggaraa n rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.071.570	402.320.147	76,62	100,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	208.773.800	207.508.950	99,39	100,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.029.000	239.832.600	87,35	100,00	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	40.700.000	40.692.600	99,98	100,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.815.202	99,91	100,00	



5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.991.600	99,72	100,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	234.468.440	208.966.586	89,12	100,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	2.700.884.416	2.590.558.412	95,92	100,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	509.006.702	496.984.080	97,64	100,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	221.500.000	173.902.300	78,51	100,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	186.900.000	175.783.300	94,05	100,00	

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.832.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 114.848.148,00,- Persentasi 93,50 % dan realisasi Fisik sebesar 100,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Suangi (WS) dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dan Kontruksi Air Tanah dan Air Beku	122.832.000	114.848.148	0	100,00	



3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Program Pengelolaan dan Pengembangan dengan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.888.943.449,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 2.568.016.888,- Persentasi 88,89 % dan realisasi Fisik sebesar 99,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM	495.642.000	487.702.735	98,40	100,00	
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	64.734.000	20.900.000	32,29	100,00	
		Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	19.885.000	14.650.000	73,67	100,00	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	479.943.600	444.061.817	92,52	100,00	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	1.828.738.849	1.600.702.336	87,53	95,00	

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Program Pengelolaan dan Pengembangan dengan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.029.917.575,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 1.839.830.627,- Persentasi 90,64 % dan realisasi Fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.010.000	98.173.000	98,16	100,00	
		Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	1.929.907.575	1.741.657.627	90,25	100,00	

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.151.944.455,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 5.518.821.178,- Persentasi 77,17 % dan realisasi Fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.727.568.226	2.006.168.779	73,55	100,00	
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4.424.376.229	3.512.652.399	79,39	100,00	



6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Program Pengembangan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.642.989.465,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 16.072.659.139,- Persentasi 77,86 % dan realisasi Fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	14.163.009.924	11.256.117.324	79,48	100,00	
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Kabupaten/Kota	6.479.979.541	4.816.541.815	74,33	100,00	

7. PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.361.547.412,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 13.853.753.331,- Persentasi 75,45 % dan realisasi Fisik sebesar 91,67 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan	281.914.000	276.989.188	98,25	100,00	



Lain fungsi bangunan Gedung	Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	8.149.366.521	6.500.624.751	79,77	75,00	
	Rehabilitasi, Renovasi dan ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	9.930.266.891	7.076.139.392	71,26	100,00	

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.538.210.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 6.477.764.744,- Persentasi 99,08 % dan realisasi Fisik sebesar 100,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.538.210.000	6.477.764.744	99,08	100,00	

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.165.325.026,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 23.159.680.294,00,- Persentasi 82,23 % dan realisasi Fisik sebesar 100,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan	1.675.780.000	1.375.062.460	82,06	100,00	
		Survey Kondisi Jalan dan/ Jembatan	350.000.000	339.587.850	97,03	100,00	
		Pembangunan Jalan	17.206.798.500	14.792.863.096	85,97	100,00	
		Rekonstruksi Jalan	332.130.000	138.723.924	41,77	100,00	
		Rehabilitasi Jalan	696.371.000	666.865.859	95,76	100,00	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	1.230.807.000	743.971.211	60,45	100,00	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	5.347.189.526	4.092.921.703	76,54	100,00	
		Pengawasan Teknis Penyelenggara n Jalan / Jembatan	1.326.249.000	1.009.684.191	76,13	100,00	

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI

Program Pengembangan Jasa Kontruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 809.657.002,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 757.363.275,- Persentasi 93,54 % dan realisasi Fisik sebesar 100,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil	604.999.000	578.439.855	95,61	100,00	



	Kontruksi	Kontruksi					
2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan jasa Kontruksi	204.658.002	178.923.420	87,43	100,00	

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 551.673.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 525.613.418,00,- Persentasi 95,28 % dan realisasi Fisik sebesar 100,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	178.552.000	168.038.859	94,11	100,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	225.833.000	214.574.718	95,01	100,00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	147.288.000	142.999.841	97,09	100,00	



Selama tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah melaksanakan 11 program, 19 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, Indikator kinerja program urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tanjungpinang ditunjukkan sebanyak 12 indikator kinerja yang tersebar di 10 program pembangunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 indikator dengan status capaian kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator dengan status capaian kategori tinggi, sebanyak 1 indikator dengan status capaian kategori sedang, sebanyak 1 indikator dengan status capaian kategori rendah.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian Target RKPD 2023	Status
				Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	48.40	33.25	47.37	142.47	ST
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan terbangun	km	2.19	4.5	4.617	102.60	ST
3.		Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	km	372.13	265	374.28	141.24	ST
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jaringan air minum yang terpasang	%	65.90	65.39	65.92	100.81	ST
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T	unit	4	3	0	0	SR



		terbangun						
6.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah titik genangan	titik	23	22	22	100	ST
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang tertata	%	45.00	35.00	45.31	129,46	ST
8.	Program Jasa Konstruksi	Persentase pemohon uji konstruksi yang dilayani	%	100	100	100	100	ST
		persentase ijin Jasa Konstruksi yang diverifikasi	%	100	100	100	100	ST
9.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase RTBL yang ditetapkan dengan Perwako	%	33.33	50	33.33	66.66	S
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase ruang yang dimanfaatkan sesuai peruntukan	%	22.00	26.00	22.06	84.85	T
		2. Persentase RTH publik	%	15.22	18.55	15.22	82.05	T



EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)
OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPd dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (%)				
					RKPd	APBD	I	II	III	IV										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11 = 7 + 8 + 9 + 10	12 = 11 / 6 * 100								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
						443.105.214.831		103.114.636.942		3.328.947.774		9.294.359.039		27.699.131.438		45.513.381.404	85.835.819.654	36,64	83,24	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				443.105.214.831		103.114.636.942		3.328.947.774		9.294.359.039		27.699.131.438		45.513.381.404	85.835.819.654	36,64	83,24	
103		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				443.105.214.831		103.114.636.942		3.328.947.774		9.294.359.039		27.699.131.438		45.513.381.404	85.835.819.654	36,64	83,24	
10301		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.170.221.378		15.803.597.558		3.190.118.915		4.292.179.471		3.278.177.551		4.186.992.675	14.947.468.612	100,00	94,58	
103012,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				252.950.658		255.927.456		39.221.708		41.036.497		43.126.370		119.220.862	242.605.437			
103012,0101		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	132.949.478	1	122.926.276	0,27	24.720.217	0,30	27.519.507	0,337	12.629.860	0,0977	53.840.429	1,00	118.710.013	100,00	96,57
103012,0107		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	120.001.180	1	133.001.180	0,16	14.501.491	0,14	13.516.990	0,62	30.496.510	0,0828	65.380.433	1,00	123.895.424	100,00	93,15
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
103012,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.237.890.095		9.081.597.284		1.934.765.881		2.889.437.072		1.977.596.796		2.056.674.126	8.858.473.875			
103012,0201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	600	8.237.890.095	600	9.081.597.284	142	1.934.765.881	212	2.889.437.072	150	1.977.596.796	95,933	2.056.674.126	600	8.858.473.875	100,00	97,54
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
103012,05		Administrasi Umum Perangkat Daerah				327.990.000		111.980.000		-		3.710.000		41.001.000		59.200.000	103.911.000			
103012,0502		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenakanannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenakanannya	Paket	1	189.000.000	1	31.980.000		0		0	1	18.056.000	0	13.200.000	1	31.256.000	100,00	97,74
103012,0509		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	138.990.000	30	80.000.000		0	1,00	3.710.000	27	22.945.000	2	46.000.000	30,00	72.655.000	100,00	90,82
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
103012,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.147.129.665		1.768.830.460		324.366.481		357.970.113		221.269.652		501.836.424	1.405.442.670			
103012,0601		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	29.956.500	1	29.266.000	0,18	5.038.650	0,19	5.239.560	0,54	10.837.829	0,0928	7.834.380	1,00	28.950.419	100,00	98,92
103012,0602		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	275.679.840	1	804.206.300	1	253.524.000		243.256.500		0	0	145.075.000	1	641.855.500	100,00	79,81
103012,0603		Penyediaan Peralatan Rumah Tanooa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanooa yang Disediakan	Paket	1	39.997.950	1	37.097.950	0,17	6.057.159	0,17	6.057.159	0,56	12.379.608	0,1	12.200.454	1,00	36.694.380	100,00	98,91
103012,0604		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	256.509.600	1	204.795.800	0,19	28.789.583	0,19	28.743.518	0,55	57.246.155	0,0753	62.978.894	1	177.758.150	100,00	86,80
103012,0605		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	119.988.775	1	168.392.840	0	0		0	0,9	31.759.764	0,1	86.104.310	1	117.084.074	100,00	69,99
103012,0606		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	75.000.000	1	0		0		0		0	1	0	1	-	100,00	#DIV/0!
103012,0609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	349.997.000	50	525.071.570	3,75	30.957.089	9,05	74.673.376	34	109.046.296	3,2044	187.643.386	50	402.320.147	100,00	76,62
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				



No	Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)	
					RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7 + 8 + 9 + 10		12 = 11 / 6 * 100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103012,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.150.000.000		729.502.800		383.481.550		40.692.600		199.815.202		63.860.000		687.849.352		
103012,0705		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	350.000.000	50	208.773.800	50	207.508.950		0		0	0	0	0	207.508.950	100,00	99,39
103012,0706		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	550.000.000	20	280.029.000	20	175.972.600		0		0	0	63.860.000	20	238.832.600	100,00	85,65
103012,0708		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	3	150.000.000	3	40.700.000		0	3	40.692.600		0	0	0	3	40.692.600	100,00	99,98
103012,0709		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	200.000.000		0		0	1	199.815.202		0	1	199.815.202	100,00	99,91
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	94,29		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
103012,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.283.160.960		2.938.352.856		464.406.845		749.541.689		685.541.931		903.026.133		2.802.516.598		
103012,0801		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	0,10	0	0,32	952.900	0,48	0	0,1024	2.038.700	1	2.991.600	100,00	99,72
103012,0802		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	446.560.000	1	234.468.440	0,17	39.776.109	0,31	72.892.685	0,39	45.145.827	0,1378	51.151.965	1	208.966.586	100,00	89,12
103012,0804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.833.600.960	1	2.700.884.416	0,25	424.630.736	0,40	675.696.104	0,2	640.396.104	0,1522	849.835.468	1,00	2.590.558.412	100,00	95,92
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	95,38		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
103012,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				771.100.000		917.406.702		43.876.450		209.791.500		109.826.600		483.175.130		846.669.680		
103012,0901		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Palkabnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Palkabnya	Unit	30	285.150.000	30	509.006.702	1,20	0		185.743.350	25,5	70.495.500	3,3	240.745.230	30,00	496.984.080	100,00	97,64
103012,0903		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	5	276.000.000	5	221.500.000		0	4	14.900.000	1	159.002.300	5	173.902.300	100,00	78,51		
103012,0906		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	209.950.000	50	186.900.000	27,8	43.876.450	15,2	24.048.150	2	24.431.100	5,0406	83.427.600	50	175.783.300	100,00	94,05
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	92,29		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
1 03 02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				550.000.000		122.832.000		-		4.500.000		9.235.853		101.112.295		114.848.148	100,00	93,50
103022,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		122.832.000		-		4.500.000		9.235.853		101.112.295		114.848.148		
103022,0102		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Dibusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Dibusun	Dokumen	1	550.000.000	1	122.832.000		0		4.500.000	1	9.235.853	0	101.112.295	1	114.848.148	100,00	93,50
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	93,50		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
1 03 03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10.320.000.000		2.936.943.449		93.695.159		207.111.106		469.017.450		1.798.193.173		2.568.016.888	100,00	87,44
103032,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				10.320.000.000		2.936.943.449		93.695.159		207.111.106		469.017.450		1.798.193.173		2.568.016.888		
103032,0101		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	4	400.000.000	4	495.642.000		0		4.800.000	3	74.439.735	1	408.463.000	4	487.702.735	100,00	98,40
103032,0102		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Superv Pembangunan/Perbaikan SPAM	Dokumen	4	500.000.000	4	64.734.000		0		4.800.000	3	4.500.000	1	11.600.000	4	20.900.000	100,00	32,29
103032,0103		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM Ikk/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	5000	2.560.000.000	5000	19.885.000		0		3.600.000	4438	3.150.000	562	7.900.000	5000	14.650.000	100,00	73,67



No	Kode	Usunan/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPd dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (%)	
					RKPd		APBD		I		II		III		IV		11 = 7 + 8 + 9 + 10		12 = 11 / 6 * 100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103032,0105		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	10000	5.700.000.000	10000	479.943.600		0		5.128.000	8000	5.334.000	2000	433.599.817	10000	444.061.817	100,00	92,52
103032,0115		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	100	1.160.000.000	100	1.876.738.849	7,1	93.695.159	14,3	188.783.106	63	381.593.715	15,594	936.630.356	100	1.600.702.336	100,00	85,29
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	87,44		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
1 03 05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.382.218.183		2.029.917.575		-		7.268.000		111.080.000		1.721.482.627		1.839.830.627	100,00	90,64
103052,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.382.218.183		2.029.917.575		-		7.268.000		111.080.000		1.721.482.627		1.839.830.627		
103052,0101		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	600.000.000	1	100.010.000		0		0	1	97.680.000	0	493.000	1	98.173.000	100,00	98,16
103052,0112		Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	110	1.782.218.183	110	1.929.907.575		0		7.268.000	88	13.400.000	22	1.720.989.627	110	1.741.657.627	100,00	90,25
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	90,64		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
1 03 06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				42.188.190.581		7.151.944.455		-		113.880.000		772.440.372		4.632.500.806		5.518.821.178	100,00	77,17
103062,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				42.188.190.581		7.151.944.455		-		113.880.000		772.440.372		4.632.500.806		5.518.821.178		
103062,0105		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	900	31.247.507.312	900	2.727.568.226		0		10.000.000	792	216.386.154	108	1.779.782.625	900	2.006.168.779	100,00	73,55
103062,0107		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	740	10.940.683.269	740	4.424.376.229		0		103.880.000	651	556.054.218	89	2.852.718.181	740	3.512.652.399	100,00	79,39
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	77,17		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
1 03 07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				298.985.804.469		20.642.989.465		-		2.061.897.668		7.393.384.761		6.617.376.711		16.072.659.139	100,00	77,86
103072,01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				298.985.804.469		20.642.989.465		-		2.061.897.668		7.393.384.761		6.617.376.711		16.072.659.139		
103072,0101		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	1	288.700.131.093	1	14.163.009.924	0,02	0		1.302.939.024	0,85	6.067.210.699	0,1271	3.885.967.602	1	11.256.117.324	100,00	79,48
103072,0102		Pemeliharaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	1	10.285.673.376	1	6.479.979.541	0,04	0		758.958.644	0,85	1.326.174.062	0,1078	2.731.409.109	1	4.816.541.815	100,00	74,33
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100,00	77,86		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST		
1 03 08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				21.461.314.494		18.361.547.412		-		1.828.638.324		4.662.375.664		7.362.739.343		13.853.753.331	100,00	75,45
103082,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penerimaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				21.461.314.494		18.361.547.412		-		1.828.638.324		4.662.375.664		7.362.739.343		13.853.753.331		



No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)												
					RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10				11 = 7 + 8 + 9 + 10		12 = 11 / 6 * 100	
103082,0101		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	1	383.914.190	1	281.914.000	0		87.143.500	0,91		78.756.988	0,09		111.088.700	1	276.989.188	100,00	98,25										
103082,0102		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	14.770.887.592	2	8.149.366.521	0,15	0	1.097.846.109	1,684		1.707.551.569	0,1632		3.695.227.073	2	6.500.624.751	100,00	79,77										
103082,0112		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	1	6.306.512.712	1	9.930.266.891	0,18	0	643.648.715	0,724		2.876.067.107	0,096		3.556.423.570	1	7.076.139.392	100,00	71,26										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																		100,00	75,45												
Predikat Kinerja Kegiatan																		ST	ST												
1 03 09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				3.512.268.890		6.538.210.000		-	102.944.700		1.694.952.723		4.679.867.321		6.477.764.744	100,00	99,08												
103092,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				3.512.268.890		6.538.210.000		-	102.944.700		1.694.952.723		4.679.867.321		6.477.764.744														
103092,0103		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1	3.512.268.890	1	6.538.210.000	0,10	0	102.944.700	0,81		1.694.952.723	0,09		4.679.867.321	1	6.477.764.744	100,00	99,08										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																		100,00	99,08												
Predikat Kinerja Kegiatan																		ST	ST												
1 03 10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				46.880.347.986		28.165.325.026		24.600.000		546.129.800		8.762.632.212		13.826.318.282		23.159.680.294	100,00	82,23											
103102,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				46.880.347.986		28.165.325.026		24.600.000		546.129.800		8.762.632.212		13.826.318.282		23.159.680.294													
103102,0102		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan sehubungan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M ²	10000	7.000.000.000	10000	1.675.780.000		0	367.587.600	10000		52.614.000	0		954.860.860	10000	1.375.062.460	100,00	82,06										
103102,0104		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	Dokumen	2	352.500.000	2	350.000.000		0	0	2		49.755.750	0		289.832.100	2	339.587.850	100,00	97,03										
103102,0105		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,5	21.951.473.000	2,5	17.206.798.500	0,03	0	14.351.500	2,1		6.634.990.954	0,3688		8.143.520.642	2,5	14.792.863.096	100,00	85,97										
103102,0108		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	0,34	165.000.000	0,34	332.130.000	0,01	500.000	1.900.000	0,2925		1.990.000	0,0407		134.333.924	0,34	138.723.924	100,00	41,77										
103102,0109		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1,2	3.978.850.000	1,2	696.371.000	0,01	0	0	1,1		13.119.000	0,09		653.746.859	1,2	666.865.859	100,00	95,76										
103102,0110		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0,34	7.253.564.986	0,34	1.230.807.000		0	8.237.600	0,2975		356.421.202	0,0425		379.312.409	0,34	743.971.211	100,00	60,45										
103102,0111		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	0,34	4.822.190.000	0,34	5.347.189.526	0,01	24.100.000	154.053.100	0,3		1.461.420.806	0,0338		2.453.347.797	0,34	4.092.921.703	100,00	76,54										
103102,0123		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	20	1.356.770.000	20	1.326.249.000	0,18	0	0	183		192.320.500	1,525		817.363.691	20	1.009.684.191	100,00	76,13										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																		100,00	82,23												
Predikat Kinerja Kegiatan																		ST	ST												
1 03 11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				362.855.550		809.657.002		20.533.700		99.784.970		414.941.535		222.103.070		757.363.275	100,00	93,54											
103112,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				250.799.175		604.999.000		9.573.450		55.378.460		373.939.750		139.548.195		578.439.855													
103112,0104		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	20	250.799.175	20	604.999.000	0,32	9.573.450	1,86		55.378.460	17,5		373.939.750	0,32	139.548.195	20	578.439.855	100,00	95,61									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																		100,00	95,61												



2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 103.114.636.942,- didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.835.819.654,- atau terealisasi 83,24% yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar 16,76% dan secara rata-rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016) merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai SKPD, memiliki Visi / Misi dengan perumusan tujuan dan sasaran. program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau serta Kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Pelayanan Air Minum Belum Optimal;
2. Pengelolaan Air Limbah (Domestik dan Non Domestik) Belum Optimal;
3. Pengelolaan Drainase dalam rangka Penanganan Banjir Belum Optimal;



4. Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi, Rob dan Longsor Belum Optimal;
5. Pengelolaan Jalan Perkotaan Belum Optimal;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belum Optimal;
7. Penyelenggaran Bangunan Gedung Belum Optimal;
8. Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Masih Belum Memadai;
9. Sarpras Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Belum Memadai.

Berdasarkan permasalahan diatas, solusi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Drainase dalam rangka Penanganan Banjir melalui (1) Penyediaan lahan untuk penanganan banjir (2) Penyediaan Data DAS dan Drainase yang Sistematis (3) Mencegah dan menindaklanjuti Adanya Praktik Pembukaan Lahan (Penambang Liar)/ Penimbunan Rawa yang Tidak Berizin (4) Pembangunan Drainase bagi kawasan yang baru terbangun.
2. Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi, Rob dan Longsor melalui (1) Penyediaan Data Terkait Abrasi dan Rob yang Komprehensif (2) Penyediaan Data Terkait Erosi pada DAS yang Komprehensif (3) Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai dan Bangunan Penahan Tanah
3. Peningkatan Pelayanan Air Minum melalui (1) penyediaan sumber air baku untuk air minum (2) Mendistribusi air minum secara merata (3) Meningkatkan SDM dan Sarpras UPTD SPAM (4) Memperbaiki pipa yang bocor dan mencegah tingginya tingkat kebocoran pipa
4. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah (Domestik dan Non Domestik) dengan (1) Membentuk UPT Sanitasi (2) Meningkatkan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat Umum dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Limbah Domestik (3) Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Limbah Non Domestik
5. Peningkatan Pengelolaan Jalan Perkotaan dengan melakukan (1) Pemeliharaan jalan kota (2) Penyediaan Sarpras dan SDM untuk



Pelaksanaan Pengelolaan Jalan (3) Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan dengan mewujudkan struktur ruang.

6. Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui (1) Memetakan izin yang Telah Dikeluarkan secara spasial (2) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (3) Mengoptimalkan Kewenangan Pengendalian Peruntukan Ruang yang Terbatas Akibat Sistem OSS.
7. Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui (1) Meningkatkan Pelayanan Uji Laik Fungsi (SLF) (2) Penataan bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya (3) Menciptakan Bangunan Publik yang Representatif dan Responsif Gender.
8. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan segala sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki.
10. Adanya komitmen dari unsur pimpinan dan staf yang bervisi ke depan, yang merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan motto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan
12. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 49), Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk drainase di Kota Tanjungpinang.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan, maka Dinas



Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah menyiapkan 8 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina Marga;
2. Penyusunan perencanaan dan program bidang Cipta Karya;
3. Penyusunan perencanaan dan program bidang Tata Ruang;
4. Penyusunan Perencanaan dan program Sumber Daya Air;
5. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina konstruksi;
6. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
8. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi;
9. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
10. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
11. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 2. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Penata Ruang Ahli Muda;



2. Penata Ruang Ahli Muda; dan
 3. Penata Ruang Ahli Muda.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Teknik Pengairan Ahli Muda;
 2. Teknik Pengairan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Pengairan Ahli Muda.
- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
1. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda;
 2. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda; dan
 3. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda.
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
REVIEW RKPD 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							26.725.169.724,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.725.169.724,00				
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							26.725.169.724,00				
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							16.964.003.413,00			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							305.000.000,00		
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
					Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselanggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselanggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Laporan	1 Dokumen	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8.893.003.413,00		
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								



					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tertibnya Pengelolaan Keuangan DPUPR	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	600 Orang/bulan	100 %	8.893.003.413,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							210.000.000,00	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Paket	B Poin	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	10 Orang	B Poin	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.675.000.000,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Paket	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								



						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	2 Paket	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Paket	100 %	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	2 Paket	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	2 Paket	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									



						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Paket	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	12 Laporan	100 %	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									950.000.000,00	
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	- Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										



					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	2 Unit	100 %	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	- Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	- Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	10 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Unit	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									



						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	- Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.071.000.000,00	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	12 Laporan	100 %	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	



1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	12 Laporan	100 %	2.716.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.860.000.000,00		
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	2 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	9 Unit	100 %	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	3 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	0,1 %	- Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	



					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	- Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							0,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0,00	
1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku								
					Volume Tampungan Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Volume Tampungan Air Baku	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		- Unit		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi								
					Volume Tampungan Air Baku	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Volume Tampungan Air Baku	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		- Unit		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							1.700.000.000,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							1.700.000.000,00	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
					Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	- Dokumen	31,26 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								



					Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	0,1 Liter/Detik	31,26 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
					Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	0,4 Liter/Detik	31,26 %	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
					Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	1 Unit	31,26 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
					Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	130 SR	31,26 %	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										1.400.000.000,00	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										1.400.000.000,00	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman											



					Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,64 %	0,3 M ³ /Hari	95,64 %	1.400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
					Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,64 %	- Unit	95,64 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat								
					Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,64 %	- Rumah Tangga	95,64 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
					Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,64 %	1 Dokumen	95,64 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							1.300.000.000,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.300.000.000,00	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								
					Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	99,28 %	5 Sistem Drainase Perkotaan	99,28 %	580.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
					Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 %	1 Dokumen	93 %	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
					Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 %	50 Dokumen	93 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							0,00	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							0,00	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
					Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	--	- Kawasan	--	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								



					Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	--	- Dokumen	--	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							2.350.000.000,00	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							2.350.000.000,00	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	1 Dokumen	66,10 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	1 KM	66,10 %	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	0,351 KM	66,10 %	2.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	- KM	66,10 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	- KM	66,10 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	2 KM	66,10 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	- KM	66,10 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
					Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,10 %	0,02 KM	66,10 %	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							411.166.311,00	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							300.000.000,00	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi								
					Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,41 %	20 Lembaga	87,41 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
					Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,41 %	50 Orang	87,41 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							111.166.311,00	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
					Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Persentase Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,41 %	15 Paket Pekerjaan	100 %	55.583.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
					Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Persentase Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,41 %	15 Badan Usaha	100 %	55.583.161,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							1.400.000.000,00	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							200.000.000,00	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 %	- Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								



						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Persentase jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 %	1 Laporan	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								400.000.000,00		
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang										
						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Rasio pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam waktu 1 (satu) tahun	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 %	1 Dokumen	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang										
						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rasio pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam waktu 1 (satu) tahun	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 %	1 Sistem Informasi	100 %	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								800.000.000,00		
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang										
						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 %	1 Dokumen	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat										



						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 %	1 Dokumen	100 %	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 %	1 Berita Acara	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
UPTD SPAM													1.300.000.000,00						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													1.300.000.000,00					
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													1.300.000.000,00				
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													1.300.000.000,00			
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													1.300.000.000,00		
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
						Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	100 Unit	31,26 %	1.300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
TOTAL													28.025.169.724,00						



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.1.1 Terhadap RPJMN.

Dalam RPJMN 2025-2029, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembangunan RPJMN 2025-2029, bidang Prasarana dan Sarana, Kementerian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
5. Program Penyelenggaraan Jalan/ Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

1.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PUPR.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025-2029 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.



Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2025-2029 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2025-2029 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran DPUPR dapat dilihat pada tabel 3.1

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN		
			2024	2025	2026
Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur berketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih (%)	30,92	31,26	31,60
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik (%)	95,57	95,64	95,71
	Meningkatnya	Persentase Kawasan	98,82	98,85	98,89



	pengendalian banjir	Bebas Genangan/Banjir			
	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota (%)	65,55	66,10	66,65
Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,91	44,25	44,58



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2025 diantaranya :

1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan ke Akses Kawasan Pariwisata, Agribisnis, Pengembangan Wilayah, Akses Perkotaan, Akses Sarana Pendidikan, dan Akses Sarana Kesehatan.

Pembangunan dibidang jalan untuk mencapai target kinerja kondisi mantap jalan kota tahun 2025 sebesar 66,10% dilaksanakan melalui kegiatan prioritas diantaranya:

- I. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- II. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
- III. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- IV. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
- V. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

2. Meningkatkan ketersediaan air melalui pembangunan embung, pembangunan jaringan air bersih (SPAM) dan sumur bor.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air juga menjadi penting untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air melalui kegiatan - kegiatan seperti pembangunan embung/situ, pembangunan jaringan iar bersih dengan rencana kegiatan antara lain :

- I. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- II. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- III. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- IV. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- V. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- VI. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan



VII. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.

3. Pembangunan sarana gedung pemerintahan yang representatif Dalam meningkatkan kenyamanan aparatur sipil Negara di Kota Tanjungpinang dan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat maka pembangunan sarana gedung pemerintahan dianggap perlu, dengan rencana kegiatan diantaranya :
 - I. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - II. Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

4. Meningkatkan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Pembangunan infrastruktur Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) juga menjadi penting untuk meningkatkan akses sanitasi di Jakarta dan melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik dengan rencana kegiatan antara lain :
 - I. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
 - II. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - III. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat



Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas PUPR Kota Tanjungpinang

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									37.720.169.724,00				64.821.072.440,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									37.720.169.724,00				64.821.072.440,00
1	03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									37.720.169.724,00				64.821.072.440,00
1	03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									15.920.169.724,00				17.971.072.440,00
1	03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									305.000.000,00				305.000.000,00
1	03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00
										21.137.000,00				
										6.120.000,00				
										11.923.000,00				
										15.983.000,00				
										700.000,00				
										23.000.000,00				
										50.000.000,00				
1	03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	1 Laporan	1 Dokumen	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	155.000.000,00
										12.924.000,00				
										12.190.000,00				
										34.576.000,00				



						Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
1	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.110.000.000,00				1.860.000.000,00			
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	2 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	250.000.000,00						
							- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						173.440.000,00										
							- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						3.000.000,00										
							- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						38.280.000,00										
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	9 Unit	100 %	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	450.000.000,00						
							- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						235.620.000,00										
							- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						19.600.000,00										
							- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						207.240.000,00										
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 %	3 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	250.000.000,00						
							- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						71.670.000,00										
							- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						33.500.000,00										
							- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						111.330.000,00										
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Persentase Peningkatan	Jumlah Peralatan dan Mesin	Terpeliharanya Barang Milik	Kota Tanjung Pinang,	0,1 %	80 Unit	100 %	160.000.000,00	Dana Transfer	Jumlah Peralatan	80 Unit	160.000.000,00						



					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lainnya yang Dipelihara	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Umum-Dana Alokasi Umum	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
												5.000.000,00				
												69.700.000,00				
												43.900.000,00				
												41.400.000,00				
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						3.000.000.000,00				2.700.000.000,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000.000,00				2.700.000.000,00	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
					Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	0,4 Liter/Detik	31,26 %	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0,4 Liter/Detik	600.000.000,00
												3.060.000,00				
												2.000.000,00				
												16.000.000,00				
												10.000.000,00				
												1.368.940.000,00				
												100.000.000,00				
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
					Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31,26 %	0,8 Liter/Detik	31,26 %	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,8 Liter/Detik	1.200.000.000,00
												7.650.000,00				
												1.000.000,00				
												1.400.000,00				
												17.250.000,00				
												26.000.000,00				
												66.112.000,00				
												1.280.588.000,00				
												100.000.000,00				



1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								1.600.000.000,00				4.600.000.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.600.000.000,00				4.600.000.000,00
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat												
					Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,64 %	50 Rumah Tangga	95,64 %	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						61.200.000,00						
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						34.230.000,00						
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						16.070.000,00						
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						7.000.000,00						
					- Belanja Makanan dan Minuman Rapat						31.500.000,00						
					- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						50.000.000,00						
					- Belanja Jasa Tenaga Ahli						100.000.000,00						
					- Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual Sekota Tanjungpinang (Swakelola)						1.200.000.000,00				2.200.000.000,00		
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												
					Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,64 %	1 Dokumen	95,64 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	
					- Penyusunan (FS) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Se Kota Tanjungpinang						100.000.000,00				100.000.000,00		
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								6.200.000.000,00				4.350.000.000,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								6.200.000.000,00				4.350.000.000,00
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan												
					Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98,85 %	5 Sistem Drainase Perkotaan	98,85 %	700.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5 Sistem Drainase Perkotaan	880.000.000,00	
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						4.896.000,00						
					- Belanja Makanan dan Minuman Rapat						12.000.000,00						
					- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						63.283.000,00						
					- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						40.000.000,00						
					- Belanja Komputer dan laptop						66.318.000,00						
					- Belanja GPS dan alat ukur						17.150.600,00						



BAB V

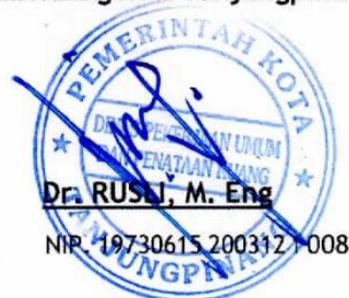
PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun 2025 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun 2024 s.d. 2026 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung kantor dan tata ruang pada tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun 2025 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Tanjungpinang



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Rekapitulasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2022
- Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang
- Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Tanjungpinang
- Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas PUPR Kota Tanjungpinang